

## **DINAMIKA KOMUNIKASI POLITIK ATAS PARTISIPASI DAN KETERWAKILAN PEREMPUAN DI PARLEMEN**

Atie Rachmiate, Yusuf Hamdan Zaenal Mukarom

### **I. PENDAHULUAN**

#### **1. Latar belakang Masalah**

Banyak persoalan di parlemen yang membutuhkan sentuhan dan sudut pandang perempuan. Sejarah politik Indonesia mencatat tingkat keterwakilan perempuan di parlemen yang rendah, meski pemilih perempuan lebih banyak dibanding jumlah pemilih laki-laki. Gambaran serupa ditemukan dalam jajaran pejabat struktural, banyak departemen, pejabat struktural didominasi laki-laki. Kondisi ini pun dapat lebih buruk karena mereka yang mengklaim mewakili kepentingan perempuan, belum tentu benar-benar memiliki perspektif perempuan.

Program pembangunan yang selama ini ditujukan bagi perempuan belum melepaskan perempuan dari mitos-mitos patriarki. Perempuan bekerja memiliki beban lebih berat. Perempuan bekerja menjadi tulang punggung keluarga bukan sekedar berpartisipasi membantu suami. Selain ia bekerja, ia pun tetap menjalankan fungsi-fungsi keluarga layaknya perempuan yang memilih peran domestik.

Studi-studi terhadap partisipasi perempuan dalam pembangunan mengisyaratkan persoalan mendasar berikut. Pertama, dari sisi normatif tidak ada persoalan menyangkut peran perempuan. Pemerintah telah memandang peran dan kedudukan perempuan sebagai hal yang perlu mendapat perhatian serius dari semua pihak. Hal ini terbukti dengan dicantumkannya masalah perempuan dalam arah kebijakan GBHN. Kebijakan ini menggambarkan bahwa persoalan ini telah menjadi persoalan nasional yang perlu ditangani secara kolektif di bawah koordinasi pemerintah.

Kedua, adanya persoalan sosiologis-politis di masyarakat. Persoalan perempuan yang terkait sosiologis-politis amat kompleks, diantaranya (a) adanya ketidaksetaraan gender, (b) diskriminasi gender, (c) kualitas kesejahteraan perempuan rendah, (d) tingkat kemandirian lembaga perempuan rendah, serta (e) peran dan kedudukan perempuan yang rendah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ketiga, pemerintah telah menggariskan kebijakan kerja sama dengan lembaga non pemerintah dalam upaya pemberdayaan perempuan Indonesia. Kebijakan ini merupakan salah satu indikator proses desentralisasi kekuasaan

dan program peningkatan kualitas sumber daya manusia. Atau dengan kata lain, pemerintah memberikan ruang partisipasi yang luas terhadap masyarakat dalam memecahkan masalah perempuan Indonesia secara kolektif.

Keempat, terdapat asumsi kolektif bahwa pemberdayaan perempuan akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Asumsi ini tercermin dari berbagai program dan kebijakan yang menghubungkan perempuan dan kesejahteraan keluarga.

Kemauan politik pemerintah dalam mendorong keterwakilan perempuan amat tegas. Melalui Undang-undang No. 12/2004 pemerintah menegaskan perlunya menjamin alokasi minimum 30% kepada perempuan untuk duduk di lembaga legislatif. Pasal 65 ayat 1 menegaskan bahwa setiap partai politik dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen. Kuota 30% keterwakilan perempuan terus dianut undang-undang pemilu, namun banyak partai politik kesulitan memenuhi ketentuan tersebut.

UU pemilu secara tidak langsung merupakan salah satu bentuk akomodasi politik atas tuntutan pentingnya kesetaraan gender bagi kalangan perempuan dalam wilayah politik sekaligus memberikan ruang partisipasi politik yang lebih besar bagi perempuan dalam pembangunan bangsa. Perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki untuk berpartisipasi diberbagai bidang kehidupan, termasuk dalam politik. Namun dalam realitasnya, Undang-undang ini sepertinya belum diterapkan secara maksimal. Hal ini terjadi karena ini merupakan aturan baru, sehingga masih banyak pengurus partai politik yang belum memahaminya. Selain itu juga ketatnya persaingan memperebutkan kursi dewan menyebabkan keterwakilan perempuan mengikuti mekanisme persaingan alamiah.

Budaya politik ini juga sangat kuat pengaruhnya kepada orientasi politik masyarakat terutama partai politik dalam perekrutan kader dan penjurangan calon legislatif. Orientasi politik memegang peran yang sangat penting dalam penjurangan kader legislatif baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Dengan adanya persepsi negatif tentang perempuan dalam dunia politik mengakibatkan orientasi politik perempuan juga negatif dan akibatnya perempuan marginal dalam komposisi calon legislatif. Sebaliknya, calon legislatif laki-laki karena dipersepsi positif menyebabkan jumlah mereka dominan di dalamnya.

Pada gilirannya budaya politik bukan hanya berpengaruh terhadap orientasi politik perempuan, tetapi berdampak juga terhadap strategi

komunikasi politik perempuan. Dalam konteks budaya patriarki, pilihan ikon dan lambang-lambang komunikasi politik didesain menurut struktur maskulin. Karena itu, menarik dipertanyakan bagaimana pilihan strategi komunikasi politik aktivis perempuan dalam mendorong keterwakilan dan kualitas partisipasi politiknya.

## **2. Identifikasi Masalah**

Permasalahan dalam penelitian ini difokuskan kepada **Bagaimanakah strategi komunikasi aktivis perempuan dalam meningkatkan kualitas partisipasi dan keterwakilan politik perempuan di parlemen ?**

Demi ketajaman analisis, fokus masalah tadi diidentifikasi menjadi sub-sub masalah sebagai berikut.

- a. Bagaimanakah bentuk-bentuk partisipasi politik perempuan dan implikasinya terhadap alokasi kekuasaan politik ?
- b. Kendala-kendala kultural apakah yang dihadapi aktivis perempuan dalam meningkatkan kualitas partisipasi dan keterwakilan perempuan di parlemen ?
- c. Bagaimanakah pilihan strategi komunikasi untuk mendorong keterlibatan politik perempuan di parlemen ?

## **3. Tujuan Penelitian**

- a. Menemukenali bentuk-bentuk partisipasi politik perempuan dan implikasinya terhadap alokasi kekuasaan politik.
- b. Menganalisis kendala-kendala kultural yang mengekang aktivis perempuan sehingga keterwakilan perempuan di parlemen tetap rendah.
- c. Mendesain strategi komunikasi politik bagi peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen.

## **4. Kerangka Pemikiran**

Realitas sosial yang menggambarkan kecenderungan minimumnya keterwakilan perempuan dalam legislatif tentu dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satu faktor yang disinyalir amat kuat pengaruhnya adalah budaya politik. Budaya politik lahir dari budaya bangsa yang ada dalam masyarakat. Budaya bangsa merupakan cerminan pola hidup masyarakat. Budaya yang dominan di Indonesia adalah budaya Patrimonialistik. Menurut Gaffar (2000;115) budaya patrimonialistik adalah budaya dimana pemerintah ada di bawah kontrol seseorang dan kelompoknya. Budaya patrimonialistik ini memiliki karakteristik: (a) kecenderungan untuk memperkuat sumberdaya yang dimiliki seorang penguasa kepada teman-temannya, (b) kebijaksanaan seringkali bersifat partikularistik daripada bersifat universalistik; (c) *rule of*

---

*law*, merupakan sesuatu yang bersifat sekunder bila dibandingkan dengan kekuasaan dari seorang penguasa (*rule of man*); dan (d) kalangan penguasa politik seringkali mengaburkan antara mana yang menyangkut kepentingan umum dan mana yang menyangkut kepentingan publik.

Budaya yang dianut oleh masyarakat ini sangat menentukan orientasi dan partisipasi masyarakat dan orientasi inilah yang menyebabkan tidak banyak perempuan yang mau menjadi calon legislatif. Selain itu masyarakat Indonesia juga dikenal sebagai masyarakat yang kuat budaya Patriarki, yaitu menempatkan perempuan pada posisi yang selalu berada di bawah laki-laki. Budaya patriarki menempatkan perempuan pada posisi yang lebih mengutamakan peran-peran domestik.

Kuatnya pengaruh budaya bangsa ini pada politik lambat laun membentuk budaya politik yang kemudian menjadi cara pandang dan persepsi masyarakat mengenai politik. Politik selalu dihubungkan dengan hal-hal yang lebih bersifat maskulin yang dianggap kontras dengan sifat-sifat keperempuanan yang feminim. Perempuan dianggap tidak cocok untuk terjun di dunia politik yang keras karena menganggap bahwa perempuan memiliki watak yang lemah lembut, tidak kuat dan tidak tegas. Perempuan juga dianggap tidak mampu menjadi pemimpin sebuah organisasi, partai politik atau pemerintahan. Banyak perempuan yang memiliki pendidikan dan kemampuan yang tinggi tetapi karena terikat dengan budaya patriarki ini, mereka tidak berminat terjun dalam dunia politik termasuk menjadi calon anggota legislatif. Dalam sistem budaya patriarki laki-laki dianggap lebih sesuai untuk terjun di dunia politik. Peran laki-laki sebagai kepala rumah tangga, pengambil keputusan dan pencari nafkah (*bread winner*) sesuai dengan arena politik yang sarat dengan peran pengambil kebijakan dan isu-isu kekuasaan. Rata-rata yang dipilih adalah laki-laki, karena laki-laki yang selama ini melakukan upaya-upaya pemberdayaan politik (Hesti Wijaya, 2001: 20).

Nilai patriarki ini dijelaskan dengan teori gender yang melihat perbedaan perempuan dan laki-laki dari segi biologi yang dipandang sebagai hal yang menyebabkan perbedaan peran gender dalam kehidupan yang lebih luas, yaitu kehidupan sosial (Sumiarni, 2004:9). Teori gender membawa angin baru setidaknya mempengaruhi cara pandang orang dalam melihat relasi laki-laki dan perempuan. Dengan teori ini laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kedudukan yang sama dalam semua bidang kehidupan.

Dalam gender terdapat teori hukum alam (*Nature*) yang menyatakan bahwa perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan ditentukan oleh jenis kelamin mereka. Menurut teori ini, berbagai hormon yang dibentuk oleh tubuh perempuan dan laki-laki telah membuat laki-laki berbeda dengan

perempuan. Misalnya perbedaan hormonal mengakibatkan laki-laki menjadi lebih agresif dibanding perempuan, sedangkan perempuan diidentikkan dengan peran domestiknya sifat keibuannya yang dianggap sebagai kodrat.

Persepsi negatif tentang perempuan ini juga amat kuat dibentuk oleh media yang sering memvisualisasikan perempuan berbeda dengan laki-laki. Media menggambarkan perempuan dengan laki-laki sebagai sesuatu yang mempunyai kegiatan yang berbeda dan memutuskan hal-hal yang berbeda dengan cara-cara yang berbeda pula (Deddy Mulyana, 1999:157). Penggambaran perempuan dalam media diberbagai Negara, ditampilkan perempuan orang yang patuh tidak mementingkan diri, ibu dan isteri yang selalu berkorban, obyek seks dan lain-lain yang menggambarkan perempuan dalam posisi yang lemah (Jurnal Perempuan, 2003:32). Sebagai sosok yang lemah, rentan dan tidak berdaya ini perempuan dianggap tidak cocok dengan dunia politik yang sering dicap keras, tegas dan kuat.

Kuatnya budaya patriarki di Indonesia menjadi penyebab utama perempuan kurang aktif berperan dalam dunia politik. Hambatan budaya ini lebih lanjut menjadi hambatan komunikasi bagi perempuan untuk berpartisipasi di ranah publik. Persepsi yang telah berurat akar di masyarakat tersebut menyebabkan orientasi politik perempuan untuk terjun dalam politik terbatas sekalipun mereka memiliki kemampuan dan keahlian yang memadai. Sekalipun terdapat beberapa perempuan yang aktif dalam politik seperti menjadi pengurus partai politik, keaktifan mereka lebih disebabkan karena profesi suami atau ajakan orang lain, bukan karena keinginan sendiri.

Politik sebenarnya bukan sekedar usaha melakukan perebutan kekuasaan, tetapi lebih luas lagi politik adalah usaha pengaturan kehidupan bersama masyarakat termasuk juga ada didalamnya urusan perempuan. Dalam politik kepentingan (*interest*) dan kebutuhan (*needs*) orang atau golongan senantiasa menjadi pendorong utama. Karena dunia politik saat ini lebih dikuasi oleh laki-laki maka kepentingan perempuan kemudian terabaikan. Untuk menghindari hal tersebut maka representasi perempuan dalam politik harus didorong untuk sepadan secara kualitas dan kuantitas bahkan lebih baik lagi sesuai dengan jumlah mereka di masyarakat. Tuntutan UU pemilu tahun 2004 tentang kuota 30% perempuan di legislatif menjadi pendorong utama agar perempuan banyak aktif di dalamnya. Disinilah peran komunikasi politik sangat dibutuhkan untuk mencapai hal tersebut.

Partai politik sebagai lembaga resmi saluran politik masyarakat semestinya melakukan upaya strategi komunikasi politik. Menurut Miriam Budiardjo (1996:31) dalam Negara demokrasi partai politik menyelenggarakan 4 (empat) fungsi, yaitu: komunikasi politik, sosialisasi politik, rekrutmen politik dan pengatur konflik. Keempat fungsi ini menjadi

barometer fungsional bagi partai politik di masyarakat. Strategi komunikasi yang bisa dibangun oleh partai politik adalah dengan pengemasan pesan dan strategi media (Firmanzah, 2007: 259). *Strategi pesan* adalah pengemasan pesan politik untuk mengarahkan pemaknaan masyarakat terhadapnya. Pesan politik harus mampu membuka dan mengungkapkan tentang masalah yang sedang dihadapi masyarakat. Pesan tersebut juga tidak hanya merupakan wacana, tetapi juga mengandung cara memecahkan masalah. Sedangkan *strategi media* berkaitan dengan pemilihan media yang sesuai untuk menyampaikan pesan-pesan politik. Media tidak selamanya sebagai saluran yang menggambarkan perempuan secara negatif. Media juga mampu mengangkat posisi perempuan sederajat dengan laki-laki. Penyampaian pesan politik melalui media sangat tepat menggunakan teori difusi inovasi. Everet M. Rogers (Onong, 1993: 284) mendefinisikan difusi inovasi sebagai proses dimana suatu inovasi dikomunikasikan melalui saluran tertentu dalam jangka waktu tertentu diantara para anggota suatu sistem sosial. Difusi melakukan penyebaran pesan-pesan sebagai ide baru.

Dengan difusi inovasi ini media mengangkat isu pengarusutamaan gender (*gender mainstream*) termasuk didalamnya partisipasi perempuan dalam politik berupa keterwakilan secara proporsional. Isu partisipasi perempuan merupakan inovasi baru dalam masyarakat yang disebarluaskan oleh media. Dengan mengangkat isu keterwakilan ini memberikan pengetahuan (*knowledge*), persuasi dan penegasan (*confirmation*) kepada masyarakat tentang pentingnya perempuan dalam dunia politik.

Dahlan (1990:3-32) dalam makalah “Perkembangan Komunikasi Politik sebagai Bidang kajian” menjelaskan hubungan komunikasi sebagai media publik. Menurutnya, perkembangan komunikasi politik yaitu melalui pencapaian teknologi telah membawa perubahan yang besar pada berbagai sisi kehidupan manusia termasuk dalam bidang politik. Politik tidak hanya berisi sosialisasi program dan kebijakan publik oleh yang berkuasa, tetapi politik juga merupakan usaha persuasi agar khalayak sependapat atau mempunyai kesamaan makna dan tujuan sehingga sejalan dengan proses politik.

Fungsi utama dari partai politik adalah sebagai komunikasi politik. Menurut Lord Windhlesham (Onong, 2002: 195) komunikasi politik adalah suatu penyampaian pesan politik yang secara sengaja dilakukan oleh komunikator kepada komunikan dengan tujuan membuat komunikasi berperilaku tertentu. Sedangkan komunikasi politik didefinisikan Dan Nimmo (2005:9) sebagai “*communication (activity) considered political by virtue of its consequences (actual or potential) which regulate human conduct under the condition of conflict*”. Jadi berdasarkan paradigma

komunikasi ini, penelitian ini mengarah pada dinamika politik, budaya patriarki yang menjadi kendala serta strategi politik dengan pendekatan teori-teori komunikasi politik. Dinamika politik yang ada di masyarakat berupa budaya politik parochial dan patriarki perlu dirumuskan ulang melalui komunikasi politik yang tepat. Demikian juga orientasi politik para perempuan harus diarahkan untuk lebih siap berpartisipasi dalam dunia politik, misalkan dengan mengajarkan kepada mereka pendidikan kewarganegaraan, kesadaran akan hak-hak politik dan lain sebagainya. Secara visual, kerangka pikir dapat dilihat pada gambar 1.

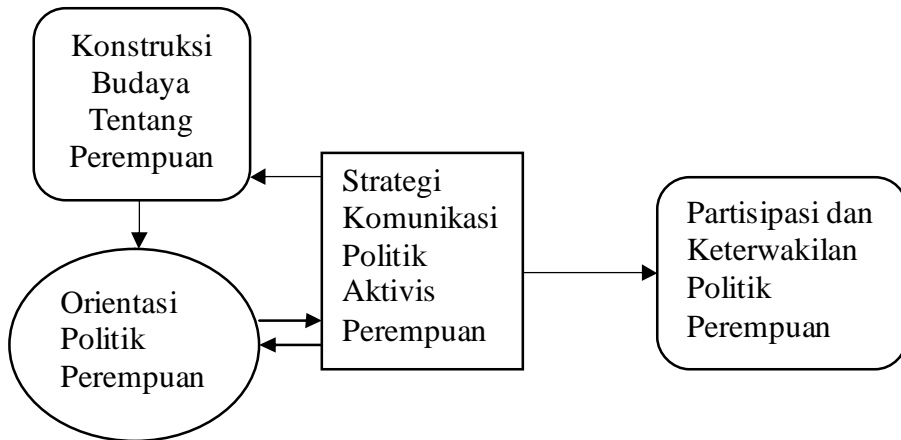
## **II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Partisipasi Politik Perempuan**

Partisipasi politik bisa diartikan sebagai pelibatan diri atau kelompok pada kegiatan-kegiatan politik seperti di lembaga-lembaga partai politik, legislatif dan eksekutif. Sementara partisipasi politik perempuan adalah kegiatan-kegiatan pelibatan diri kaum perempuan dalam aktivitas-aktivitas politik praksis. Bentuk-bentuk partisipasi politik bisa diwujudkan dalam kontribusi pemikiran-pemikiran politik maupun pelibatan diri secara aktif dalam kegiatan-kegiatan politik seperti menjadi pengurus partai politik, menjadi calon anggota legislatif (MPR dan DPR), menjadi anggota dewan legislatif dan bisa juga duduk di lembaga-lembaga eksekutif.

Fenomena partisipasi politik perempuan masih menjadi wacana yang berkepanjangan. Kondisi ini barangkali, politik hingga kini masih dipahami sebagai aktifitas kasar, kotor dan penuh resistensi tinggi bagi pelakunya. Dengan demikian, perempuan yang dipandang penuh dengan jiwa kelembutan, halus, penuh perasa dan tidak kelihatan mempunyai performa *powerfull* kurang pantas bila harus terjun ke dunia politik. Dunia politik dicitrakan sebagai dunia laki-laki, karena laki-laki mempunyai sifat-sifat yang tidak seperti disebutkan tadi.





**Gambar 1: Kerangka Pemikiran**

Berkaitan dengan partisipasi politik perempuan, ada beberapa persepsi dan motivasi kaum perempuan dalam memahami gerak dan langkah (*track and record*) perempuan dalam bidang politik. Menurut informan dari Partai Hanura (Hati Nurani Rakyat), PAN, GOLKAR, yang mewakili partai nasionalis jawabannya senada bahwa;

*“Bentuk-bentuk partisipasi perempuan dalam politik diwujudkan dengan keikutsertaan dalam kegiatan-kegiatan politik, baik sebagai pengurus partai maupun pemegang amanah sebagai wakil rakyat di dewan legislatif atau di lembaga-lembaga eksekutif.” Selain dalam bentuk sumbangsih ide-ide politik, kegiatan riil dalam politik dan dukungan politik demi kemajuan bangsa.”* (Iha sholiha, Yeti, Iis)

Tentunya, berpartisipasi aktif dalam kegiatan politik tidak datang sendirinya. Ada pemicu kuat untuk berperan aktif dalam kegiatan politik di antaranya:

1. Kaum perempuan masih minim di pentas-pentas politik, berbeda dengan kaum laki-laki yang secara kuantitas sangat banyak;
2. Nasib kaum perempuan mengkhawatirkan sekali sehingga perlu diperjuangkan oleh kaumnya sendiri;
3. Agar *image* (citra) perempuan yang dianggap tidak punya kemampuan apa-apa dibandingkan dengan kaum laki-laki bisa terbantahkan.”

Bentuk pertama, maksudnya ialah kaum perempuan ikut serta memikirkan nasib bangsa (lebih khusus lagi memikirkan nasib kaum perempuan) dan memberikan solusi atas permasalahan-permasalahan bangsa. Dalam bentuk yang kedua, kaum perempuan terlibat langsung dalam



kegiatan-kegiatan politik sebagai pemegang kebijakan, baik di internal partainya sendiri maupun di luar partai (dalam lembaga-lembaga legislatif dan eksekutif).

Adapun yang menjadi motivasi kaum perempuan harus berpartisipasi aktif dalam kegiatan politik menurut mereka:

1. Sudah saatnya kaum perempuan harus bangkit untuk memberikan kontribusi buat kemajuan bangsa dan negara;
2. Agar kemampuan kaum perempuan tidak diremehkan lagi oleh kaum laki-laki;
3. Agar nasib-nasib kaum perempuan yang selama ini terkesan diskriminasi oleh pihak laki-laki bisa diperjuangkan;
4. Sudah menjadi tuntunan agama bahwa antara perempuan dan laki-laki dalam hal kemampuan tidak boleh dipilah-pilah.

Pandangan wakil dari 3 partai nasional ini memang rasional sekali, karena bentuk partisipasi itu bermacam-macam corak. Keikutsertaan secara langsung bukanlah hal yang mutlak, akan tetapi komitmen dalam berjuang merupakan hal yang paling penting. Sehingga partisipasi itu bisa diwujudkan dengan cara apa saja, dengan catatan bisa berdampak positif bagi kemaslahatan bersama.

Adapun landasan perempuan harus berperan aktif dalam politik menurut pandangan Iis ialah;

1. Jumlah perempuan di Indonesia melebihi kaum laki-laki sehingga nasibnya harus diperjuangkan oleh kaumnya sendiri. Sebab, yang memahami perempuan hanyalah perempuan itu sendiri;
2. Nasib kaum perempuan selama ini kurang diperhatikan;
3. Adanya peluang di parlemen untuk kaum perempuan dalam berpartisipasi aktif di parlemen.

Berbeda dengan pandangan Ineu Sri Wahyuni dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Partisipasi perempuan dalam politik harus dibuktikan dengan adanya representasi kaum perempuan di legislatif dan eksekutif. Bila itu tidak ada maka kaum perempuan dianggap tidak berpartisipasi dalam politik. Dengan demikian, landasan kaum perempuan harus berpartisipasi aktif dalam politik di antaranya sudah banyak kaum perempuan yang mampu memimpin dan paham terhadap persoalan-persoalan bangsa. Di samping itu, dalam hal-hal tertentu kaum perempuan bisa unggul apabila dibandingkan dengan kaum laki-laki..

Hal senada dikemukakan oleh Enok Komariah dari Partai Gerindra, partisipasi politik perempuan tidak akan terwujud bila sistem tidak memberikan ruang kepada kaum perempuan. Jadi partisipasi perempuan

dalam politik akan bisa terwujud bila kesempatan-kesempatan gerak kepada perempuan dibuka selebar-lebarnya.

Adapun motivasi perempuan dalam berpolitik menurutnya ialah;

1. Jumlah kaum perempuan di lembaga-lembaga legislatif, termasuk lembaga penyelenggara negara sangat sedikit. Bila dibandingkan dengan jumlah laki-laki sangat kontras, padahal kaum perempuan yang mempunyai kapasitas mumpuni dalam bidang politik mulai banyak;
2. Adanya peluang atau kuota 30% di parlemen.

Sementara itu, Ika Kartika Rahayu dari Partai Amanat Nasional (PAN) memberikan satu pemikiran, partisipasi perempuan dalam politik bisa dilakukan dengan cara keikutsertaan dalam prosesi-prosesi pencalonan, baik di legislatif maupun di eksekutif atau menjadi pengurus inti dari partainya sendiri. Alasannya, banyak persoalan kaum perempuan masih belum tersentuh. Mungkin karena kaum laki-laki kurang paham terhadap masalah perempuan secara mendalam (komprehensif).

### **Bentuk partisipasi perempuan dalam perbaikan alokasi kekuasaan politik dan kekuatan efikasi partisipasi politik perempuan dalam alokasi sumber daya politik**

Informan dari Hanura berpendapat bahwa memang ada kemajuan dalam hal alokasi kekuasaan politik, meskipun menurutnya masih belum optimal. Namun, setidaknya memberikan angin segar bagi kaum perempuan dalam ikut berpartisipasi dalam aktivitas politik. Perbaikan-perbaikan dalam alokasi kekuasaan politik sebenarnya sudah bagus dibandingkan dengan jaman dulu. Kaum perempuan hanya segelintir saja yang duduk sebagai anggota dewan, ketika itu. Di lembaga eksekutif pun perempuan kurang-lebih hanya menduduki sebagai menteri pemberdayaan perempuan. Statemen ini diperkuat oleh Yeti dan Iis bahwa, Alokasi kekuasaan politik bukan hanya sudah terbuka bagi kaum perempuan, tapi juga sudah didukung oleh kesiapan dari kaum perempuan dalam mengisi alokasi-alokasi kekuasaan tersebut. Kesiapan yang dimaksud adalah kesiapan mental, terutama dalam berkompetisi dengan kaum pria.

Namun Ineu berbeda pendapatnya. walaupun sudah ada perbaikan alokasi kekuasaan politik, namun kelemahan dari kaum perempuan sendiri ialah keinginan dan gairah berpolitik kaum perempuan pun masih belum maksimal. Sebagaimana ungkapnya; "*Interest* kaum perempuan dalam politik masih belum berimbang dengan kebutuhan dan tuntutan kaum perempuan secara umum."

Informan lain, Enok, memahami bahwa perbaikan dalam alokasi kekuasaan politik bagi perempuan sudah meningkat. Argumentasinya, dulu kurang

memberikan ruang lebih kepada kaum perempuan untuk menduduki posisi-posisi penting di pemerintahan maupun di dewan. dalam tubuh partai sendiripun masih minim, jadi kebanyakan kaum laki-laki yang menduduki pos-pos strategis. Ini bisa kita lihat, hanya sedikit kaum perempuan yang berhasil menjadi puncak pimpinan di partai, apalagi di luar partai.”

Memang ada benarnya argumentasi Enok bila melihat dari kacamata sejarah partisipasi politik perempuan. Namun Ika tidak sependapat dengan Enok. Kader PAN tersebut rupanya mempunyai argumentasi sendiri. Menurutnya kuota 30% bagi keterwakilan kaum perempuan di lembaga legislatif bukan langkah solutif dalam memperjuangkan kaum perempuan. Kiprah perempuan tetap saja dibatasi oleh nilai kuota tersebut. Hal ini dapat kita lihat dalam pernyataannya; ”Sebenarnya masih belum optimal, karena walaupun ada ruang kuota 30% bagi kaum perempuan, akan tetapi tetap saja ruang gerak perempuan dalam menduduki jabatan-jabatan politik masih dibatasi. Padahal, partisipasi perempuan kini sudah mulai bagus dibandingkan dengan masa lalu.”

Ketidakpuasan Ika, Yeti dan Enok terhadap kebijakan kuota 30% bagi keterwakilan perempuan karena dianggap masih ada kebijakan diskriminatif. Menurutnya laki-laki dan perempuan dalam hal kapasitas masih dipengaruhi oleh persoalan-persoalan genderitas sehingga ada penilaian yang tidak sportif.

Terlepas dari masalah setuju atau tidak setuju dengan kebijakan pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan kuota 30 % bagi keterwakilan kaum perempuan. Ternyata pemenuhan kuota tersebut dikeluhkan oleh partai-partai politik. Kesulitan-kesulitan tersebut disebabkan oleh banyak hal. Menurut Ika, dominasi kaum laki-laki di tubuh partai merupakan hal yang tidak bisa terelakkan karena masih banyak kaum laki-laki yang ada di tubuh partai politik. Sementara Menurut Yeti, sebenarnya sumber daya perempuan itu ada dalam memenuhi kuota 30%. Akan tetapi permasalahannya, banyak pertimbangan bagi kaum perempuan ketika mencalonkan dirinya sebagai calon legislatif.

Pertimbangan tersebut berkaitan dengan urusan-urusan rumah tangga, biaya politik yang jumlahnya tidak sedikit dan desakan dengan kaum laki-laki. Alasan lain dikemukakan oleh Iis, menurutnya, karena memang gerakan perempuan pun secara umum berbeda dengan laki-laki. Padahal secara kapasitas intelektual dan kiprah sebenarnya banyak perempuan yang mampu. Kemudian Ika menambahkan, selain masalah kesempatan. Manuver politik kaum perempuan dengan laki-laki berbeda. Laki-laki menurutnya dipandang lebih berani dari perempuan. Sehingga inilah yang membedakan hasil dari pencalonan di legislatif.

Persoalan-persoalan seputar pemenuhan kuota 30% bagi keterwakilan kaum perempuan di legislatif menjadi perbincangan serius di tubuh partai-partai politik peserta pemilu. **Ada tidaknya retriksi dari pimpinan partai politik dalam memenuhi kuota 30% bagi keterwakilan perempuan dan dukungan terhadap ketentuan ini melalui kesiapan dari kaum perempuan**, hasil temuan penelitian berikut ini. Ternyata ada catatan-catatan tersendiri ketika perempuan harus didelegasikan ke wilayah-wilayah politik praksis. *Pertama*, kualitas perempuan sendiri harus benar-benar ditingkatkan. *Kedua*, perempuan harus punya pandangan yang visioner jauh ke depan dalam memahami persoalan-persoalan bangsa. *Ketiga*, kesiapan mentalitas untuk mengimbangi probematika-problematika sosial dan kemasyarakatan.

Partisipasi politik perempuan dipahami oleh mereka (orang-orang yang diwawancarai) sebagai kegiatan keikutsertaan dalam kegiatan politik, baik langsung maupun tidak langsung. Bentuk-bentuk partisipasi politik bisa berupa dukungan moral, sumbangsih ide-ide dan aktualisasi kegiatan politik. Pendapat-pendapat mereka di atas secara substantif menunjukkan satu kesamaan persepsi tentang bentuk partisipasi politik perempuan. Walaupun secara geografis mereka dipisahkan oleh bentangan jarak dan waktu. Semestinya mereka mempunyai perspektif yang berbeda dalam memahami konsep partisipasi politik perempuan. Karena secara *background* (latarbelakang) kepartaian, masing-masing dari mereka berasal dari partai-partai yang berbeda haluan (ideologi). Namun, kenyataan corak berpikir mereka hampir relatif sama. Garis ideologi partai tempat mereka bernaung tidak mewarnai arah gerakan masing-masing. Corak berfikir mereka kelihatannya hanya didasarkan pada hasil pemikiran pribadi *an sich*.

Dengan demikian ideologi partai yang bervariasi masih hanya berkuat pada tataran simbolitas belaka. Ideologi partai hanya satu trik politik untuk menarik simpatik masyarakat yang didasarkan pada karakter masyarakat dan keyakinan masyarakat (agama). Ideologi bukan satu sumber acuan orang-orang yang bernaung di partai tersebut. Ideologi bukan sebagai representasi dari arah gerakan partai termasuk orang-orang partai. Jadi, antara ideologi dengan orang-orang di partai tersebut dalam posisi saling berpaling, bukan saling beriringan.

## **2. Kendala-kendala kultural**

Kodrat kewanitaan ternyata berpengaruh terhadap pencitraan kaum perempuan. Tampilan-tampilan luar kaum perempuan ternyata dipahami sebagai representasi kemampuan perempuan dalam berbagai dimensi kehidupan, bahkan membudaya hingga zaman sekarang. Berkaitan dengan

hal tersebut, ada beberapa pandangan kaum perempuan tentang budaya Jawa Barat (Sunda) dalam memahami perempuan dan politik.

Menurut Iha, Yeti, Iis, budaya Jawa Barat dalam memahami perempuan masih sempit. Artinya, perempuan masih dipersepsi sebagai kaum yang kurang “sreg” bila harus terjun ke panggung politik. “Sepertinya perempuan masih diposisikan sebagai orang yang masih tabu dengan hal-hal politik, buktinya suara perempuan dalam setiap pemilihan masih minim.” Demikian pula dalam dunia politik di Jawa Barat masih identik dengan budaya maskulin. Laki-laki masih dipahami sebagai sentra kegiatan politik. Alasannya politik identik dengan wajah yang keras, tegas, kuat dan kotor. Sehingga hanya laki-lakilah yang pantas bergelut dalam dunia politik.

Alasan kuat mengapa budaya Jawa Barat masih kuat dengan budaya laki-laki karena ada faktor gengsi. Laki-laki terkesan berontak bila harus dipimpin oleh perempuan karena perempuan dalam pemahaman laki-laki masih diposisikan sebagai orang kedua; Argumentasi ini diperkuat oleh Enok; bahwa “Perempuan masih dianggap lemah ketika harus terjun ke dunia politik. Sedihnya lagi, perempuan dipandang tidak akan bisa untuk seperti laki-laki.” Artinya konstruksi budaya Jawa Barat belum komprehensif dalam memahami perempuan. Kelemahan-kelemahan fisik perempuan dipahami sama dengan kapasitas intelektual, pengalaman dan keahlian perempuan. Kiprah perempuan masih dibatasi oleh aturan-aturan budaya yang memandang perempuan sebagai orang yang hanya mampu mengerjakan hal-hal tertentu saja. Urusan politik masih diragukan oleh sebagian besar orang terutama laki-laki.

Pandangan kaum perempuan anggota legislatif tentang **cermin budaya patriarki dalam pilihan bentuk dan simbol komunikasi politik di Indonesia**, serta anggapan adanya budaya komunikasi politik didesign menurut kultur maskulin, dipaparkan berikut ini. Iha mengakui bahwa kelebihan-kelebihan kaum laki-laki dalam tampakkan fisik menjadi simbol komunikasi efektif dalam turut mengkonstruksi budaya maskulin di Indonesia. Menurut pernyataan Iha; “Sepertinya kaum laki-laki masih diidentikan dengan sosok yang kuat, tahan banting dan tidak cengeng sehingga pantas seandainya budaya politik di Indonesia masih identik dengan budaya maskulin.”

Yeti mempunyai pandangan yang sama dengan pendapat sebelumnya, bahwa menurutnya “Laki-laki masih dipandang sebagai sosok yang kuat, teguh dan berwibawa dibandingkan dengan kaum perempuan. Hal ini mengakibatkan kultur yang terbangun ialah kultur maskulin.” Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Iis, bahwa “Laki-laki *image*-nya dipandang sebagai sosok yang mempunyai power dalam hal tampilan luar, kalau

perempuan dalam hal fisik kelihatannya jarang yang berwibawa. Hal itu jelas berpengaruh terhadap konstruksi budaya di kita.” Demikian juga Ineu berpendapat; “Laki-laki identik dengan pekerjaan keras dan kasar. Politik termasuk kategori lingkungan kasar. Tentunya itu berpengaruh terhadap desain budaya maskulin di negara kita.”

Walaupun secara substansi sama, namun Enok mempunyai persepsi lain tentang persoalan ini. Menurutnya; “Para kaum lelaki dipandang dan diidentikan dengan sosok yang bisa menjadi andalan dalam memimpin karena wataknya yang tidak mudah putus asa dan senang melakukan hal-hal yang kasar sekalipun. Kondisi ini mengakibatkan kultur yang terbangun dominan kelelakian.”

Pendapat di atas kemudian dikuatkan oleh Ika. Menurutnya; “Laki-laki identik dengan jiwa *strong*, tidak mudah menyerah dan banyak akal, sementara kaum perempuan sebaliknya. Padahal kan kalau bicara sebenarnya belum tentu perempuan dipandang lemah, itu hanya konteks fisik saja. Karena dasar watak laki-laki dipandang melebihi perempuan, sehingga kultur yang terbangun di masyarakat ialah kultur maskulin.”

Jadi jelas bahwa laki-laki masih dipahami sebagai seorang sosok yang kuat, tegas, lugas dan tidak mudah menyerah. Sifat-sifat inilah kemudian menjadikan dasar dalam konstruksi budaya maskulin di Jawa Barat. Padahal, satu hal yang perlu diingat bahwa dibalik sifat-sifat fisik laki-laki yang dipahami banyak kekuatan, belum tentu diimbangi dengan mentalitasnya. Fisik laki-laki bisa saja kuat, namun belum tentu dibalik kekuatan fisik laki-laki diimbangi dengan kekuatan mentalitasnya.

Kemudian hambatan-hambatan kultural (budaya) yang dihadapi perempuan dalam memilih karir dalam bidang politik serta strategi untuk mengatasinya, dikemukakan Iha bahwa; “Kultur yang terbangun di Jawa Barat, posisi perempuan dipandang belum pantas untuk terjun ke politik”. Strateginya menurut Iha, dengan mengubah paradigma pikir masyarakat yang awalnya sempit supaya lebih terbuka. Tetapi itu dilakukan secara bertahap, perlahan tapi pasti dan secara berkelanjutan.

Adapun menurut pendapat Yeti; “Hambatan keluarga seperti izin dari suami dan anak-anak. Solusinya dengan memberikan pemahaman secara terus-menerus sampai mereka yakin dan paham.” Pendapat yang hampir sama dikemukakan oleh Iis. Menurutnya, yang menjadi hambatan-hambatan kaum perempuan ketika harus terjun ke politik ialah keluarga dan juga kesempatan. Lebih jelasnya dapat dilihat dalam statemennya; “Keluarga dan kesempatan. Terkadang keluarga bisa jadi penghalang dalam berkiprah di politik. Di samping keluarga, juga minimnya kesempatan perempuan. Strateginya dengan mengkomunikasikan dengan baik dan terbuka.”

Namun menurut Ineu; dalam menghadapi “Dominasi kaum laki-laki.” Strateginya harus berani menunjukkan kemampuan diri, ketika harus berhadapan dengan kaum laki-laki.” Lain halnya dengan pendapat Enok. Menurutnya; “Aturan-aturan lokal yang masih tabu dengan kiprah perempuan dalam berpolitik. Strateginya dengan pembiasaan secara perlahan-lahan.” Sedangkan menurut Ika; “Kesempatan yang diberikan buat kaum perempuan masih dibatasi oleh aturan-aturan. Contohnya kuota 30% sebetulnya batasan kaum perempuan untuk berkiprah di politik. Strateginya, harus ada pengkajian ulang terhadap aturan-aturan tersebut.”

Budaya Jawa Barat menurut mereka ialah budaya yang kental dengan budaya maskulin dalam konteks politik. Laki-laki dianggap orang yang tepat dalam urusan-urusan politik karena laki-laki dipandang kuat, tegas, tidak cengeng dan punya kharismatik yang tinggi. Politik dipahami sebagai dunia yang syarat dengan kekerasan, kotor, penuh rekayasa dan butuh ketegasan. Alasan tersebutlah politik senantiasa diidentikkan dengan dunia kekelakian (maskulin).

Sementara, kaum perempuan dipandang sebagai sosok kebalikan laki-laki. Argumentasi tersebutlah yang mempengaruhi terhadap kiprah perempuan dalam politik. Perempuan secara tidak langsung terjejal oleh *frame-frame* masyarakat yang sebetulnya tidak rasional. Perempuan tidak dengan leluasa memasuki ranah-ranah politik karena dipandang kontra dengan dunia kewanitaan.

Di samping persoalan-persoalan di atas. Hambatan-hambatan perempuan ketika memasuki wilayah politik berasal dari dimensi dunia kewanitaan dalam pengertian khusus. Kaum perempuan mengalami hambatan keluarga seperti izin suami dan anak-anak. Di samping itu, *cost* politik yang tinggi menjadi salah satu pertimbangan kuat bagi kaum perempuan ketika harus memaksakan diri terjun ke wilayah politik.

### **3. Strategi Komunikasi Politik Perempuan**

Kuatnya budaya maskulin dalam dimensi politik di Indonesia tentunya menjadi satu penghambat bagi pemenuhan kuota 30% keterwakilan perempuan. Kondisi ini harus diubah dengan memberikan pemahaman-pemahaman kepada masyarakat luas secara perlahan dan berkesinambungan. Namun, tidak semudah seperti membalikkan telapak tangan ketika akan merubah kultur yang sudah mengkristal di masyarakat. Perlu adanya strategi yang cerdas. Menurut Iha, strategi komunikasinya dengan terus mempropagandakan bahwa selama ini kaum perempuan nasibnya masih belum diperhatikan. Namun, menurut Yeti, strateginya bisa dilakukan dengan mengangkat isu-isu gender.



Pendapat lain dikemukakan oleh Iis, menurutnya, strateginya dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas kaum perempuan di tubuh partai sehingga peluang-peluang perempuan lebih terbuka. Menurut Ineu, Kaum perempuan harus berani tampil lebih giat dalam pentas-pentas politik. Enok menambahkan, Harus secara terus-menerus menggembor-gemborkan bahwa selama ini ada ketimpangan nasib antara kaum laki-laki dan perempuan. Sementara Ika mempunyai persepsi lain, menurutnya dengan mengupayakan jalur hukum agar perlakuan terhadap kaum perempuan lebih adil dalam berpolitik sehingga ruang-ruang berpolitik bagi perempuan lebih terbuka.

Di samping adanya strategi-strategi komunikasi politik yang efektif, harus ada upaya lain yang mesti dilakukan. Selama ini faktor-faktor luar seringkali menjadi alasan kuat berkaitan dengan marginalisasi kaum perempuan di panggung politik. Padahal, perempuan pun ada “kecacatan-kecacatan” tertentu dalam hal komunikasi politik. Contohnya ialah dalam hal persuasi dan lobi politik. Karena ini akan berpengaruh terhadap distribusi kekuasaan.

Upaya-upaya yang perlu dilakukan oleh kaum perempuan menurut para aktivis perempuan di antaranya; “Kaum perempuan sebelum terjun ke dunia politik sebaiknya ada upaya pelatihan skill terutama skill yang berkaitan dengan bahasa politik kaum perempuan.” (Iha). Menurut Yeti; “Perempuan harus mempunyai keahlian dulu sebelum terjun ke politik terutama berkaitan dengan keahlian dalam bahasa politiknya.” Adapun menurut Iis; “Sepertinya harus ada penangkal *image*, yang sebelumnya dipersepsi bahwa bahasa perempuan terkesan cengeng, kini tidak lagi.” Berbeda dengan Ineu “Perempuan harus mampu menunjukkan keahlian dirinya dan meyakinkan masyarakat bahwa perempuan sekarang tidak seperi dulu. Perempuan sekarang banyak yang pintar, cerdas dan sudah sama dengan laki-laki dalam hal kiprahnya di sektor politik.” Menurut Enok; “Sepertinya harus ada *Building image* (membangun citra) bahwa pada awalnya perempuan dipersepsi sebagai sosok yang lemah, kini tidak lagi.” Dan Menurut Ika; “Harus ada semacam pendidikan khusus bagi perempuan sebelum terjun ke dunia politik. Pendidikan khusus dimaksud ialah keterampilan komunikasi yang baik.”

Sementara itu, isu gender juga seringkali diketengahkan untuk mensiasati peluang perempuan memasuki ranah-ranah politik praksis di legislatif dan eksekutif. Namun, apakah ini benar-benar menguntungkan kaum perempuan atau bahkan sebaliknya. Karena pengalaman pada pemilihan calon anggota legislatif 2009 banyak caleg perempuan yang rontok, kecuali mereka berlatarbelakang artis. Berkenaan dengan menguntungkan atau merugikan, Iha berkomentar. “Sedikit besarnya

menguntungkan. Kalaupun banyak caleg perempuan banyak yang kalah dalam pemilihan legislatif 2009 karena sebagian masyarakat masih ragu terhadap kemampuan perempuan dalam urusan politik, padahal kaum perempuan dalam hal kemampuannya sekarang sudah bisa melebihi kaum laki-laki.” Menurut yeti; “Bisa juga, setidaknya mengubah paradigma masyarakat. Kalaupun banyak calon legislatif perempuan banyak yang tidak masuk dalam pemilihan yl, karena hanya kalah strategi saja, juga pandangan masyarakat masih menganggap bahwa kaum perempuan masih terbatas dalam langkah dan gerakannya.” Menurut Iis; “Kurang efektif, karena tetap saja kaum perempuan belum sepenuhnya bisa diterima oleh masyarakat luas dalam berpolitik. Bukti kuatnya dalam pemilu calon legislatif kemarin, caleg perempuan masih kalah saing dengan caleg laki-laki. Padahal kalau bicara jujur, kemampuan perempuan belum tentu di bawah laki-laki.” Pandangan lain menurut Ineu bahwa;”Ada juga ruang-ruang gerak politik perempuan sedikit terbuka, dan masyarakat mulai menerima tentang eksistensi perempuan dalam politik, meskipun saya akui belum sepenuhnya, untuk lebih maksimal tentunya butuh proses dan perjuangan. Selanjutnya menurut Enok; “Sangat menguntungkan, karena membantu dalam proses pemunculan kader-kader perempuan di partai maupun di luar partai. Kalaupun dalam pemilihan caleg 2009 kemarin perempuan masih banyak yang tumbang karena perempuan langkahnya masih terbatas saja, padahal saya yakin kemampuan mereka bisa bersaing dengan kaum laki-laki.” Sedangkan menurut Ika; “Yang jelas, karena dengan isu itu masyarakat diharapkan bisa menerima kehadiran kaum perempuan dalam politik. Adapun perempuan dalam pemilu caleg masih banyak yang tereliminir, itu karena persoalan kemampuan perempuan dalam hal trik politik saja ketika kampanye di masyarakat.”

Mereka berpendapat bahwa pembangunan *image*, peningkatan kemampuan kaum perempuan, dan ada kejelasan hukum tentang kiprah perempuan dalam politik merupakan salah satu strategi untuk mendorong keterwakilan perempuan dalam politik. Namun, itu pun tidak akan berhasil ketika mengabaikan komitmen kaum perempuan itu sendiri.

Keterwakilan perempuan dalam politik bukan hanya satu syarat luar belaka, bukan sebagai syarat atas nama demokrasi dan emansipasi. Semua itu harus diimbangi dengan hakikat mengapa harus ada keterwakilan perempuan dalam wilayah politik. Dengan demikian wacana keterwakilan perempuan dalam wilayah politik harus menjamin terhadap perubahan bangsa menuju satu tatanan yang adil, makmur, damai, sejahtera yang bernafaskan nilai-nilai ketuhanan.

Jelasnya, wacana dan upaya keterwakilan perempuan dalam politik jangan difokuskan untuk menutupi syarat simbolitas belaka. Yang lebih

substansial ialah bagaimana visi, misi dan komitmen kaum perempuan dalam turut serta membangun peradaban bangsa.

### **III. PENUTUP**

#### **3.1 Kesimpulan**

Dinamika komunikasi politik perempuan merupakan cermin dari dinamika komunikasi partai politik, dimana tidak ada desain dalam satu sistem yang bisa menyingkronkan antara ideologi partai dengan para kadernya, termasuk kader perempuan. Ideologi partai harus menjadi rujukan gerak dan langkah para kader/aktivis partai politik. Sehingga identitas partai bisa terlihat dalam aksi-aksi nyata. Sementara ini perbedaan ideologi partai politik hanya bisa dilihat dalam simbolitas saja. Fungsi ideologi partai hanya sekedar goresan tinta di atas kertas. Sementara substansi dari ideologi partai yang notabene sumber arah perjuangan dan gerakan terabaikan begitu saja.

Rendahnya tingkat keterwakilan perempuan dalam politik tidak mencerminkan minimnya peran serta perempuan dalam pembangunan sosial. Hubungan laki-laki dan perempuan dalam konteks pembangunan sosial harus dilihat dalam kerangka pembagian peran secara proporsional dimana peran perempuan dalam *national and character building* amat dominan. Untuk itu hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Partisipasi politik perempuan adalah kontruksi sosial yang dapat diubah, dibentuk, dan dimodifikasi oleh pola interaksi yang terbangun di dalam masyarakat. Pembagian peran secara fungsional akan lebih mengarah kepada keteraturan dan dinamika sosial ketimbang memajukan pandangan dikotomis dengan dunia laki-laki dan perempuan. Ada kesamaan substansi corak berpikir antara perempuan aktivis partai yang notabene berbeda ideologi.
2. Hambatan struktural, institusional, dan kultural masih membatasi peran politik perempuan. Hambatan kultural tampak lebih dominan dibanding yang lainnya. Karena itu, dibutuhkan usaha pendidikan politik yang sistematis, yang serempak dengan jaminan adanya kesamaan di dalam kesempatan bagi perempuan yang memiliki kompetensi politik yang memadai.
3. Strategi komunikasi dan gerakan politik afirmatif dalam penetapan komposisi kepengurusan partai politik akan berpengaruh signifikan terhadap keterwakilan perempuan. Pembangunan *image* positif, peningkatan kemampuan kaum perempuan, dan ada kejelasan hukum tentang kiprah perempuan dalam politik merupakan salah satu strategi untuk mendorong keterwakilan perempuan dalam politik. Namun, itu pun tidak akan berhasil ketika mengabaikan komitmen kaum perempuan itu sendiri. Fokus perjuangan gerakan perempuan harus mengarah kepada peningkatan jumlah

perempuan di dalam kepengurusan partai politik agar perempuan terlibat dalam pengambilan kebijakan strategis partai politik dan menyediakan kader yang memadai bagi jabatan-jabatan politik.

### **3.2 Saran-saran**

1. Untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik di tengah kuatnya kendala kultural menuntut kehandalan kaum perempuan dalam manajemen diri melalui kemampuan manajemen waktu, manajemen personal, dan membina hubungan baik dengan laki-laki sehingga terhindar dari pandangan sektarian dalam memandang peran sosial, politik, dan kehidupan sosial itu sendiri.
2. Perlunya komunikasi politik dengan intensitas yang tinggi dari partai politik dan kaum perempuan legislatif untuk membangun *image* positif melalui berbagai saluran dan media komunikasi, serta ada kejelasan hukum tentang kiprah perempuan dalam politik merupakan salah satu strategi untuk mendorong keterwakilan perempuan. Disamping itu diperlukan komitmen dari kaum perempuan itu sendiri.
3. Diperlukan telaahan lebih mendalam tentang kemungkinan penerapan *affirmatif policy* (*zipper system*) dalam kepengurusan partai politik yang diatur di dalam undang-undang kepartaian. Regulasi dimaksud akan mewajibkan parpol mencantumkan *zipper system* di dalam AD/ART dan melaksanakannya dalam menetapkan komposisi kepengurusan partai dan saat penetapan daftar calon legislatif.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Dahlan, M. Alwi, *Perkembangan Komunikasi Politik sebagai Bidang Kajian*, Makalah disampaikan dalam diskusi panel Korps Mahasiswa komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta, 30 Maret 1990.
- Gaffar, Afan, 2004. *Politik Indonesia, Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nimmo, Dan, 2005. *Political Communication and Public Opinion*. Goodyear Publishing Company, California.
- Sumiarni, Endang, 2004. *Gender dan Feminisme*, Wonderful Publishing Company, Yogyakarta.
- Wijaya, Hesti, 2001, *Perempuan dalam Pusaran Demokrasi*, IP-4 Lapera, Bantul.
- Zillah, Eisenstein, 1984, *The Female Body and The Law*, Berkeley, University of California Press.